

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KUALITAS PENGAWASAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Qisthin Afifa Fadliana, Adri Putra Nugraha

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the quality of local government financial management with the quality of internal supervision as a moderation. APIP Auditor Competence is considered an important factor to improve the effectiveness and efficiency of financial management in the public sector; and examines the role of internal supervision in strengthening the relationship between APIP competence and the quality of financial management. This study applies a quantitative approach, involving data collected through survey utilizing questionnaires distributed to respondents directly involved in the financial management of local governments. The results of SEM-PLS analysis exhibit that APIP competence has a positive effect on the quality of local government financial management. Despite the positive effect of the internal supervision in strengthening the influence of APIP competence, its effect does not significantly improve the quality of financial management without other factor supports. As such, this study emphasizes the importance of improving APIP competence and optimizing internal supervision to achieve better financial management in local governments.

Keywords: APIP Auditor Competence; Management Finance Local Government; Internal Supervision; Quality Management Finance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kualitas pengawasan intern sebagai moderasi. Kompetensi Auditor APIP dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di sektor publik. Penelitian ini juga menguji peran pengawasan intern dalam memperkuat hubungan antara kompetensi APIP dan kualitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, meskipun pengawasan intern memiliki dampak positif dalam memperkuat pengaruh kompetensi APIP, pengaruhnya tidak cukup besar untuk meningkatkan secara signifikan kualitas pengelolaan keuangan tanpa didukung faktor-faktor lain. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi APIP dan optimalisasi pengawasan intern untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik di pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompetensi Auditor APIP; Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; Pengawasan Intern; Kualitas Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah aspek yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal (Didi, 2019). Kualitas pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya sekadar mengenai bagaimana dana publik dikelola secara efisien, tetapi juga melibatkan aspek integritas dan transparansi yang mencerminkan keseluruhan sistem pemerintahan (Didi, 2019). Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah menjadi sangat penting karena akan berdampak langsung pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan (Azlina, 2019).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran sentral dalam menjamin bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kompetensi yang dimiliki oleh APIP dalam menjalankan fungsi

pengawasan, audit, dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas (Dewi Mulyati et al., 2022).

Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melibatkan sejumlah aspek penting, seperti pengelolaan anggaran, pengawasan pengeluaran, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar akuntansi yang berlaku. Tingkat kualitas dalam pengelolaan keuangan ini memiliki dampak besar terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (Anggraeni & Kiswanto, 2018).

Pelaporan keuangan yang transparan dan akurat menjadi landasan bagi pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik dan stakeholder lainnya. Dengan menyajikan informasi keuangan secara jelas dan terperinci, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan akuntabilitasnya di mata masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku merupakan prasyarat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2022).

Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi masalah terkait penyalahgunaan anggaran, kelemahan dalam pelaporan keuangan, dan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Penyalahgunaan anggaran dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengendalian intern yang efektif, rendahnya kesadaran akan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, atau adanya tekanan politik untuk mengalokasikan dana pada kepentingan tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya publik dan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu fenomena penting adalah bahwa meskipun daerah sudah mendapatkan WTP, kualitas pengawasan internal di beberapa daerah masih sering dipertanyakan. Kasus-kasus ketidakpatuhan dalam penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta potensi korupsi dapat terjadi meskipun status WTP telah dicapai. Tantangan yang dihadapi oleh daerah di Jawa Timur meskipun telah mendapatkan predikat WTP. Ada kasus-kasus ketidakpatuhan dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai, yang disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan internal.

Pemerintah Kabupaten Malang pada 10 tahun terakhir kembali menerima opini WTP dari sepuluh kali berturut-turut. Meskipun begitu, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Nurman, Penanggung Jawab Sekda Malang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang juga mendapatkan beberapa catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti untuk diperbaiki antara lain masalah pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan aset tetap, dan pembiayaan jaminan kesehatan program *Universal Health Coverage* (timesindonesia, 2024). Pemkab Malang juga masih mempunyai tunggakan iuran kepada BPJS selama empat bulan senilai lebih dari Rp 80 miliar (detik.com, 2023). Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset tetap, Pemkab Malang meminta bantuan Kejari Kabupaten Malang selaku Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang berhasil melakukan tindakan penyelamatan aset berupa motel dan Gedung Pertemuan Ika Mandiri yang dikuasai oleh pihak ketiga, PT Putra Arema, sejak tahun 1996. Sejak tahun 2007 hingga saat ini (2024) tidak memiliki landasan hukum dalam pengelolaannya karena berakhirnya masa kerjasama antara PT Putra Arema dengan Korpri Kabupaten Malang tetapi pengelolaan lahan tersebut masih berada di tangan PT Putra Arena (kejatijatim, Juli 2024).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Malang menjadi objek penelitian untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi aparat pengawas intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian akan melihat sejauh mana kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah tersebut menjadi faktor moderasi antara kualitas pengawasan intern dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adanya penelitian ini ingin melihat Pengaruh Kompetensi APIP terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Malang. Penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi yaitu Kualitas pengawasan intern yang dapat berfungsi sebagai faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara kompetensi APIP dan kualitas pengelolaan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kompetensi APIP dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan intern yang dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori Keagenan adalah teori yang sering digunakan dalam analisis keuangan dan manajemen. Teori ini menyoroti hubungan antara pemilik (prinsipal) dan agen (manajer) dalam sebuah organisasi. Dalam situasi di mana pemilik tidak dapat mengawasi secara langsung aktivitas agen, muncul ketidakseimbangan kepentingan antara keduanya. Agen sering memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemilik (Eriadi et al., 2018).

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, teori keagenan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara para pemangku kepentingan (seperti warga, anggota legislatif, dan pemerintah daerah) dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (S. M. Nasution et al., 2024). Dengan memahami dinamika keagenan ini, dapat dikembangkan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Teori Entitas

Teori Entitas adalah pendekatan yang digunakan dalam akuntansi untuk mengakui bahwa sebuah perusahaan atau organisasi memiliki identitas yang terpisah dari pemiliknya. Penerapan teori entitas dalam akuntansi memungkinkan untuk pemisahan aset, kewajiban, dan modal dari pemilik perusahaan atau entitas lain yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang jelas dan terpisah tentang kinerja keuangan entitas bisnis tersebut (Arianto Taliding et al., 2023).

Konsep teori entitas akan membantu pemangku kepentingan di Kabupaten Malang dalam memahami tujuan dan tanggung jawab yang unik sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Sebagai entitas yang mandiri, Inspektorat Kabupaten Malang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di wilayahnya melalui APIP di Lembaga tersebut. Dalam analisis yang diusulkan, teori entitas dapat membantu menjelaskan bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Malang sebagai entitas pengawasan intern pemerintah memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Fokus peneliti untuk mengidentifikasi mekanisme pengawasan yang digunakan serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di tingkat lokal khusus nya Kabupaten Malang.

Kompetensi Auditor APIP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya mendefinisikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kompetensi auditor mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural . Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas a) Manajemen Pengawasan Intern; b) Standar Audit; c) Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian; d) Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan; e) Pelaksanaan Pengawasan Intern; dan f) Pengembangan Metodologi Pengawasan.

Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah proses yang kompleks dan krusial yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh entitas pemerintah di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah mencakup sejumlah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan tersebut dikelola dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan (Heinrich & Probohudono, 2023).

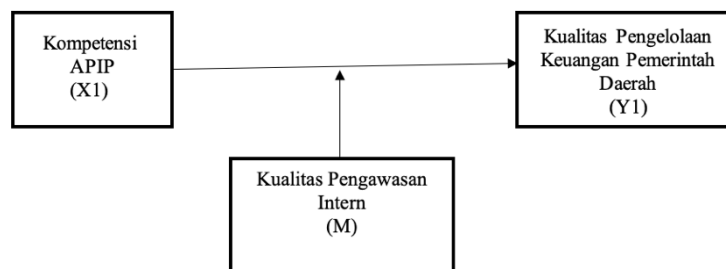
Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD). IKPD merupakan satuan ukur yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut adalah indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Indonesia, 2020) sebagai berikut : a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan d) Penyerapan anggaran; d) Kondisi keuangan daerah; e) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Kualitas Pengawasan Intern

Pengawasan Intern, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, mencakup semua proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Epriliani, 2022). Hal ini ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Kabupaten/Kota, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, berfungsi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota. Selain itu, peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur secara umum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007.

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menerbitkan Standar dalam bentuk Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021. Standar tersebut wajib diterapkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern. Kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Sedangkan standar kinerja mengatur sifat pengawasan intern dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa Pengawasan Intern, antara lain : a) Sifat dasar Pengawasan Intern; b) Tata Kelola; c) Pengendalian Intern; d) Pemantauan tindak lanjut.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian (Sumber: Data diolah peneliti, 2024)

Pengembangan Hipotesis

Kompetensi Auditor APIP terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hasil penelitian oleh Hadi & Hermanto (2018) membuktikan bahwa kompetensi APIP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Ini menegaskan bahwa kompetensi APIP yang kuat sangat berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Kompetensi yang baik akan membantu pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dan memperoleh opini yang lebih baik dari BPK RI.

H1 : Kompetensi APIP Memiliki Pengaruh Positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kualitas Pengawasan Intern Memoderasi Kompetensi Auditor APIP Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas pengawasan intern yang baik berfungsi sebagai faktor moderasi yang memastikan kompetensi APIP dioptimalkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan efektif. Sesuai dengan Peraturan BPK No. 8 Tahun 2021, pengawasan intern yang baik sangat mendukung kegiatan pengawasan APIP, yang pada gilirannya dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pengalaman di lapangan, kompetensi auditor dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas APIP.

H2 : Kualitas Pengawasan Intern memoderasi Kompetensi APIP Yang Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif seri di temukan pada penelitian pada bidang ilmu akuntansi. Penelitian ini mengambil populasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan memperoleh 60 responden karyawan Inspektorat Kabupaten Malang khususnya bagian dari APIP. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari laporan, jurnal, catatan transaksi, dan sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, metode analisis yang diterapkan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance*, juga dikenal sebagai *Partial Least Square* (PLS). PLS memiliki dua sub-model analisis jalur untuk variabel laten, yang terdiri dari uji *outer model* dan *inner model*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Outer Model dilakukan dengan tujuan menilai validitas dan reliabilitas konstruk dari setiap indikator. *Outer model* dalam penelitian ini terdiri atas : 1) Pengujian Validitas Konvergen; 2) Pengujian Validitas Diskriminan; dan Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Pengujian *Outer Model*

Variabel	Indikator	<i>Outer loading</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Composite	AVE	Keputusan
Kompetensi Auditor APIP	X.1	0.934	0.984	0.985	0.816	Valid dan Reliabel
	X.2	0.871				
	X.3	0.889				
	X.4	0.881				
	X.5	0.910				
	X.6	0.878				
	X.7	0.926				
	X.8	0.898				
	X.9	0.894				
	X.10	0.940				
	X.11	0.922				
	X.12	0.896				
	X.13	0.918				
	X.14	0.931				
	X.15	0.856				
Kualitas Pengawasan Intern	M.1	0.939	0.982	0.984	0.836	Valid dan Reliabel
	M.2	0.922				
	M.3	0.912				
	M.4	0.870				
	M.5	0.946				
	M.6	0.917				
	M.7	0.886				
	M.8	0.897				
	M.9	0.951				
	M.10	0.932				
	M.11	0.916				
	M.12	0.881				
Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.1	0.791	0.979	0.981	0.739	Valid dan Reliabel
	Y.2	0.859				
	Y.3	0.944				
	Y.4	0.874				
	Y.5	0.910				
	Y.6	0.914				
	Y.7	0.824				
	Y.8	0.892				
	Y.9	0.774				

Y.10	0.811
Y.11	0.872
Y.12	0.844
Y.13	0.773
Y.14	0.873
Y.15	0.899
Y.16	0.871
Y.17	0.914
Y.18	0.812

Nilai *Outer loading* untuk semua variabel memiliki nilai *outer loading* > 0,70 maka dapat dinyatakan semua variabel dalam penelitian ini valid. Reliabilitas ini dapat diukur melalui beberapa metrik utama yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach alpha* jika nilai >0,70 dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya nilai AVE (*Average Variance Extracted*) didapatkan nilai AVE dari ketiga variabel > 0,5 Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel laten telah memenuhi kriteria nilai AVE (> 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel laten pada penelitian ini valid dan telah lulus pengujian *convergent validity*.

Structur Equation Model (Inner Model)

Uji R- Square

Tabel2. Hasil Pengujian R-Square

<i>Effect</i>	<i>R-Square adjusted</i>
Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	0,715

Nilai *R-Square* sebesar 0,715 bahwa model struktural mampu menjelaskan 71,5% dari variabilitas variabel dependen Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan kategori sedang.

Uji F-Square

Tabel 3. Hasil Pengujian F-Square

	<i>F-square</i>
Kompetensi Auditor APIP -> Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	0,278
Kualitas Pengawasan Intern -> Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	0,262
Kualitas Pengawasan Intern x Kompetensi Auditor APIP -> Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	0,254

Pengujian F-Square, diketahui nilai F-Square menunjukkan bahwa baik Kompetensi

Auditor APIP maupun Kualitas Pengawasan Intern, serta interaksinya, memiliki pengaruh yang sedang terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua nilai F-Square menunjukkan efek sedang, yang berarti variabel-variabel yang diuji memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap variabel dependen, meskipun tidak terlalu besar.

Pengaruh Kompetensi Auditor APIP Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Kompetensi Auditor APIP yang tinggi memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dengan lebih akurat, memberikan rekomendasi yang tepat, dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peningkatan Auditor APIP berhubungan positif dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa APIP yang lebih kompeten dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

Pentingnya kompetensi auditor APIP dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka menyoroti bagaimana pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kompetensi auditor APIP dan, pada gilirannya, memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas membantu APIP untuk tetap terupdate dengan perkembangan terbaru dalam praktik akuntansi dan audit, yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Kualitas Pengawasan Intern Memoderasi Kompetensi APIP Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan intern dapat memperkuat hubungan antara kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun, pengaruh tambahan yang diberikan oleh kualitas pengawasan intern terhadap hubungan ini tidak terlalu berpengaruh.

Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar kualitas pengawasan yang juga berperan dalam mempengaruhi hubungan antara auditor APIP dan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, meskipun peningkatan kualitas pengawasan intern dapat memperkuat dampak kompetensi auditor APIP dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas pengawasan intern sendiri tidak cukup untuk sepenuhnya memperbesar dampak tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa Kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut Kompetensi Auditor APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh APIP, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya pengembangan kemampuan dan keahlian APIP dalam menjalankan tugas pengawasan, yang berdampak positif pada tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanjaya (2021), di mana ditemukan bahwa kompetensi auditor APIP berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Temuan ini semakin memperkuat

pandangan bahwa APIP yang kompeten mampu mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah.

Penerimaan hipotesis ini didukung oleh hasil pengumpulan data dari responden, di mana mayoritas menyatakan setuju bahwa kompetensi auditor APIP sangat berperan dalam mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi auditor APIP dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di pemerintah daerah.

Pengawasan intern memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara kompetensi auditor APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan intern membantu meningkatkan pengaruh kompetensi auditor APIP dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik di lingkungan pemerintahan. Namun, meskipun pengawasan intern memiliki dampak positif, perannya tidak sepenuhnya cukup untuk memperbesar pengaruh tersebut secara signifikan. Artinya, peningkatan pengawasan intern memang dapat memperkuat dampak kompetensi auditor APIP, tetapi pengawasan intern saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara optimal tanpa didukung faktor lain. Dengan demikian, penting untuk mengoptimalkan kedua aspek, baik kompetensi auditor APIP maupun kualitas pengawasan intern, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif di pemerintahan daerah.

Saran

Berdasarkan proses berjalannya penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, antara lain :

1. Untuk Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para auditor dengan rutin melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya keahlian auditor, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan meskipun waktu pemeriksaan terbatas, auditor tetap dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal. Diharapkan peran inspektorat sebagai jaminan kualitas dan mitra konsultasi dapat ditingkatkan secara maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika menambahkan variabel lain yang relevan, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terkait topik yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Kiswanto, K. (2018). The Effect Of The Completeness Of Financial Statements And Fiscal Stress On The Human Development Index Through The Regional Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 61–68. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V7i2.17481>
- Arianto Taliding, Oktovianus Sauw, Wiwin Anggriani Salawali, Vira Tandiawan, Melda Gienardy, Andi Dyna Riana, Arfandi Sn, & Muliana. (2023). Financial Analysis Of Accountability At The Regional Financial And Asset Agency(Bkad) Of The South Sulawesi Provincial Government. *International Journal Of Science And Research Archive*, 8(1), 979–987.
- Azlina, N. (2019). Good Governance Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Opd Kabupaten Solok). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 9–24.
- Bisnis Indonesia. (2023, 5 September). Kualitas Pengawasan Internal Masih Jadi Kendala

- Walau Daerah Telah Meraih WTP
Detik News. (2023, 15 Agustus). Meski Raih WTP, Banyak Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bermasalah.
- Dewi Mulyati, Andi Mattulada Amir, Muhammad Din, M. Ikbal A, & Abdul Pattawe. (2022). Analysis Of Factors Influencing The Performance Of Regional Government Apparatuses. *Jurnal Manajemen*, 26(1), 162–178.
- Didi, D. (2019). Model Mediasi Dan Moderasi Dalam Hubungan Antara Perilaku Politik Pimpinan, Kompetensi Auditor, Dan Kinerja Auditor. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 48–71.
- Eriadi, Erlina, Muda, I., & Abdullah, S. (2018). Determinant Analysis Of The Quality Of Local Government Financial Statements In North Sumatra With The Effectiveness Of Management Of Regional Property As A Mediator. *International Journal Of Civil Engineering And Technology*, 9(5), 1334–1346.
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Konstelasi: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424.
- Hermanto., Hadi, A. (2018). Determinan Kualitas Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1 - 10.
- Indonesia, M. D. N. R. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(1496), 1–13. <https://peraturan.go.id/files/bn462-2018.pdf>
- Kompas. (2023, 22 Juli). Pengawasan Internal Daerah: Mengapa Status WTP Tidak Selalu Menjamin Pengelolaan Keuangan yang Baik.
- Menpan. (2013). *Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia*. 2008(1), 1–2.
- Nasution, S. M., Karmana, D., Kartikasari, S., & Fudsy, M. I. (2024). Influence Of Internal Control And Implementation Of Accounting Information Systems On The Quality Of Regional Government Financial Reports. *Informatics Management, Engineering And Information System Journal*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.56447/Imeisj.V1i2.260>
- Peran Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (Bpkp) Terhadap Opini Dan Temuan Audit. 1–23.
- PERATURAN NOMOR: PER-01/AAIPI/DPN/2021. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Republika. (2023, 10 September). Tantangan Pengawasan Internal di Daerah Meski Telah Mendapatkan Predikat WTP.
- Saragih, J. (2022). Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth And Human Development: Evidence From Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 89–106.